

TINGKAT PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DI KOTA BANDUNG TENTANG INTEGRASI NVWP DAN NIK

Armitha Putri Bestari

Universitas Katolik Parahyangan
Email: armithaputribestari@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan wajib pajak yang ada di kota Bandung tentang Integrasi Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Induk Kependudukan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di kota Bandung. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 33 sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang langsung didapat dari sumbernya. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan teknik penyebaran purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner. Berdasarkan tingkat pengetahuan wajib pajak tentang Integrasi Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Induk Kependudukan.

Kata-kata kunci: Pengetahuan Perpajakan; Pengetahuan Wajib Pajak; Nomor Induk Kependudukan; Nomor Pokok Wajib Pajak; Penerapan *Single Identify Number*; Integrasi NPWP dan NIK; Penggabungan NPWP dan NIK

ABSTRACT

This research aims to determine the level of knowledge among taxpayers in the city of Bandung regarding the integration of the Taxpayer Identification Number (Nomor Pokok Wajib Pajak) and the Population Identification Number (Nomor Induk Kependudukan). This study utilizes qualitative research methodology. The population of this research consists of registered taxpayers in the city of Bandung. The sample size used in this study is 33 samples. The data used in this research are primary data obtained directly from the source. Data collection techniques involve the distribution of questionnaires using purposive sampling. Data collection is conducted through questionnaires. Based on the level of knowledge of taxpayers regarding the integration of the Taxpayer Identification Number and the Population Identification Number.

Keywords: Tax Knowledge; Taxpayer Knowledge; Population Identification Number; Taxpayer Identification Number; Implementation of Single Identity Number; Integration of NPWP and NIK; Merger of NPWP and NIK



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

PENDAHULUAN

Pendahuluan Mulai tanggal 14 Juli 2022, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai menerapkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Mengacu pada PMK –112/PMK.03/2022 Tentang NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta., 2021; Sukmawati, 2014). Tujuan dari penggabungan NIK dan NPWP yaitu untuk memberikan kepastian hukum terhadap keduanya, mendukung kebijakan satu data Indonesia (*Single Identify Number*), memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien (Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan, 2006). Program integrasi NPWP dan NIK ini resmi diterapkan mulai 1 Januari 2024 (Abuyamin, 2010; Fata, 2022). Alasan dari pemilihan topik ini, saya ingin mengetahui apakah wajib pajak yang ada di kota Bandung sudah mengetahui akan adanya integrasi Nomor Induk Kependudukan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. Untuk pemilihan unit penelitian pada karya ilmiah yang saya buat adalah Wajib Pajak yang ada di kota Bandung.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan, apakah para Wajib Pajak di kota Bandung memiliki pemahaman tentang konsep Integrasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK)? apakah mereka mengetahui tujuan dari integrasi NPWP dan NIK tersebut? dan apakah mereka mengetahui kapan secara resmi integrasi NPWP dan NIK akan dilaksanakan di kota Bandung?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengertian dari penelitian kualitatif menurut Anselm Strauss dan Juliet Corbin (2003:4) dalam (Yusuf, 2016), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian ini mengambil lokasi di kota Bandung. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena ingin mengetahui tingkat pengetahuan wajib pajak tentang integrasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Waktu penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti setelah pelaksanaan Ujian Tengah Semester dengan waktu pengambilan data kurang lebih selama 2 bulan. Tidak menutup kemungkinan apabila data yang diperoleh dirasa sudah cukup untuk diolah maka akan lebih cepat dan bila dirasa data belum cukup untuk diolah, maka peneliti akan memperpanjang waktu.

Peneliti mengambil data dengan membuat kuesioner yang diberikan kepada responden. Kuesioner ini ditujukan kepada Wajib Pajak di kota Bandung untuk mengetahui tingkat pengetahuan responden tentang integrasi NPWP dan NIK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan komponen tingkat pengetahuan wajib pajak yang ada di Kota Bandung diperoleh hasil responden yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai pengertian, manfaat dan fungsi dari NIK dan NPWP dari sebanyak 33 responden (100%) semua mengetahui hal tersebut. Namun, Untuk pengetahuan wajib pajak di kota Bandung mengenai pengertian, manfaat dan tujuan *Single Identify Number* (SIN) tergolong sangat rendah karena hanya sebanyak 3 (8%) dari 33 responden yang mengetahui pengertian, manfaat dan tujuan dari *Single Identify Number* sementara sebanyak 30 responden (81%) dari 33 responden tidak mengetahui pengertian, manfaat dan tujuan dari *Single Identify Number*.

Berdasarkan hasil responden selanjutnya, sebanyak 21 responden (64%) dari 33 responden mengetahui akan adanya integrasi NPWP dan NIK dan sebanyak 12 responden (36%) belum mengetahui akan adanya integrasi NPWP dan NIK. Sebanyak 18 responden (55%) dari 33 responden pernah membaca berita/artikel tentang penggabungan NPWP dan NIK sementara 15 responden (45%) Belum pernah membaca berita/artikel tentang penggabungan NPWP dan NIK. Sedangkan sebanyak 6 responden (18%) dari 33 responden sudah mengetahui kapan integrasi NPWP dan NIK resmi diterapkan sementara sebanyak 27 responden (82%) dari 33 responden belum mengetahui kapan integrasi NPWP dan NIK resmi diterapkan. Sebanyak 3 responden (9%) dari 33 responden sudah mengetahui cara memvalidasi NIK dan NPWP melalui laman djponline.pajak.go.id sedangkan sebanyak 32 (97%) belum mengetahui cara memvalidasi NIK dan NPWP melalui lama djponline.pajak.go.id sehingga pengetahuan wajib pajak yang ada di kota Bandung terkait cara memvalidasi NIK dan NPWP masih kurang baik.

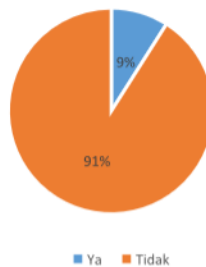
Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Manfaat dan Tujuan dari NPWP dan NIK
Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak tentang
Manfaat dan Fungsi dari NPWP dan NIK



Gambar 1 Tingkat pengetahuan wajib pajak tentang manfaat dan fungsi dari wnpw dan nik

Gambar Persentase Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak tentang manfaat dan fungsi NPWP dan NIK Berdasarkan komponen tingkat pengetahuan wajib pajak diperoleh hasil responden yang memiliki tingkat pengetahuan yang cukup baik tentang manfaat dan fungsi dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Kependudukan sebanyak 33 responden (100%) dari 33 responden mengetahui manfaat dan juga fungsi dari NPWP.

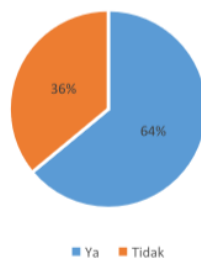
Tingkat Pengetahuan tentang pengertian, tujuan dan manfaat *Single Identify Number* (SIN)
Tingkat Pengetahuan tentang pengertian, tujuan
dan manfaat *Single Identify Number* (SIN)



Gambar 2 Tingkat pengetahuan wajib pajak tentang *single inden tiffinamber* (sin)

Berdasarkan komponen tingkat pengetahuan wajib pajak diperoleh hasil responden yang memiliki tingkat pengetahuan yang kurang baik tentang pengertian, tujuan dan manfaat *Single Identify Number* (SIN) sebanyak 3 responden (9%) dari 33 responden mengetahui pengertian, tujuan dan manfaat *Single Identify Number*(SIN) sedangkan sebanyak 30 responden (91%) dari 33 responden belum mengetahui pengertian, tujuan dan manfaat dari *Single Identify Number* (SIN).

Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak akan adanya Integrasi NPWP dan NIK
Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak akan adanya
Integrasi NPWP dan NIK

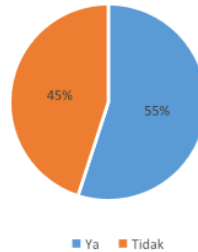


Gambar 3 Tingkat pengetahuan wajib pajak akan adanya integrasi npwp dan nik

Berdasarkan komponen tingkat pengetahuan wajib pajak diperoleh hasil responden yang memilikitingkat pengetahuan terkait akan adanya Integrasi NPWP dan NIK sebanyak 21 responden (64%) dari 33 responden mengetahui akan adanya Integrasi NPWP dan NIK sedangkan sebanyak 12 responden (36%) dari 33 responden belum mengetahui akan adanya integrasi NPWP dan NIK.

Wajib Pajak pernah membaca berita/artikel tentang penggabungan NPWP dengan NIK

Wajib Pajak pernah membaca berita/artikel tentang penggabungan NPWP dengan NIK

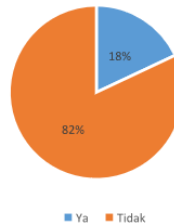


Gambar 4 Wajib pajak pernah membaca berita/artikel tentang perubahan npwp dengan nik

Berdasarkan komponen tingkat pengetahuan wajib pajak diperoleh hasil responden yang pernah membaca berita/artikel tentang penggabungan NPWP dan NIK sebanyak 18 responden (55%) dari 33 responden pernah membaca berita/artikel tentang penggabungan NPWP dan NIK sedangkan sebanyak 15 responden (45%) dari 33 responden belum pernah membaca berita/artikel tentang penggabungan NPWP dan NIK.

Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak terkait kapan integrasi NIK dan NPWP resmi diterapkan

Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak terkait kapan integrasi NIK dan NPWP resmi diterapkan



Gambar 5 Tingkat pengetahuan wajib pajak terkait kapan integrasi nik dan npwp di terapkan

Berdasarkan komponen tingkat pengetahuan wajib pajak diperoleh hasil responden yang memilikipengetahuan terkait kapan kapan integrasi NIK dan NPWP resmi diterapkan sebanyak 6 responden (18%) dari 33 responden mengetahui kapan integrasi NIK dan NPWP resmi diterapkan sedangkan sebanyak 27 responden (82%) dari 33 responden belum mengetahui kapan integrasi NIK dan NPWP resmi diterapkan.

Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak terkait mengetahui cara memvalidasi NIK dan NPWP melalui laman djponline.pajak.go.id

Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak terkait mengetahui cara memvalidasi NIK dan NPWP melalui laman djponline.pajak.go.id



Gambar 6 Tingkat pengetahuan wajib pajak terkait pengetahuan memvalidasi nik dan npwp melalui lama diponline,pajak.go.id

Berdasarkan komponen tingkat pengetahuan wajib pajak diperoleh hasil responden yang memiliki pengetahuan terkait mengetahui cara memvalidasi NIK dan NPWP sebanyak 3 responden (9%) dari 33 responden mengetahui cara memvalidasi NIK dan NPWP melalui lama djponline.pajak.go.id sedangkan sebanyak 30 responden (91%) dari 33 responden belum mengetahui cara memvalidasi NIK dan NPWP melalui laman djponline.pajak.do.id

Hasil Analisis

Hasil Analisis DJP

Berdasarkan pembahasan diatas, diketahui bahwa tingkat pengetahuan Wajib Pajak di Kota Bandung terkait Integrasi NPWP dan NIK tergolong rendah. Setelah saya analisis lebih lanjut, DJP telah melakukan beberapa upaya untuk mensosialisasikan Integrasi NPWP dan NIK diantaranya yaitu, DJP telah memasang banner iklan terkait format baru NPWP pada jalan Asia Afrika. DJP telah mempublikasikan pada laman sosial media Instagram terkait Integrasi NPWP dan NIK. DJP telah mempublikasikan Integrasi NPWP dan NIK melalui media seperti iNews, CNBC.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka didapatkan bahwa wajib pajak di kota Bandung telah mengetahui manfaat, fungsi dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan baik. Hal ini berarti tingkat pengetahuan wajib pajak di kota Bandung terkait manfaat, fungsi dari NPWP dan NIK sangat baik. Namun, ternyata hanya 64% yang mengetahui akan adanya Integrasi NPWP dan NIK sehingga 36% lainnya masih belum mengetahui akan adanya integrasi NPWP dan NIK tersebut. hanya 9% wajib pajak kota Bandung yang mengetahui cara memvalidasi NPWP dan NIK melalui laman djponline.pajak.go.id. sedangkan 81% lainnya tidak mengetahui cara memvalidasi NPWP dan NIK melalui laman djponline.pajak.go.id.

Tingkat pengetahuan wajib pajak di kota Bandung terkait cara memvalidasi NPWP dan NIK yang ada pada laman djponline.pajak.go.id menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak kurang baik. Selanjutnya, hanya 18% wajib pajak yang mengetahui kapan integrasi NPWP dan NIK resmi diterapkan. Hal ini berarti wajib pajak masih banyak yang belum mengetahui akan waktu diterapkannya integrasi NPWP dan NIK. Diketahui bahwa DJP telah melakukan beberapa upaya dalam mensosialisasikan Integrasi NPWP dan NIK namun, nampaknya hal ini kurang efektif karena masih sangat sedikit wajib pajak di kota Bandung yang memiliki rasa ingin tahu lebih lanjut sehingga, hanya mengetahui dan tidak berusaha mencari tahu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuyamin, O. (2010). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP). *Jurnal Wawasan Yuridika*, 22(1), 110–123.
- Fata, R. (2022). *Integrasi NIK Menjadi NPWP, Potensi apa bagi DJKN ??* Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-aceh/baca-artikel/15486/Integrasi-NIK-Menjadi-NPWP-Potensi-apa-bagi-DJKN.html>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta., Pub. L. No. 11, Menteri Keuangan Republik Indonesia (2021).
- Sukmawati, W. (2014). *Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak melalui Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (Npwp) dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)* [Doctoral dissertation].
- Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pub. L. No. 23, Pemerintah Indonesia (2006).
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Prenada Media.